

BAB II

GAMBARAN UMUM

PT. PLN (PERSERO) RAYON TEGALREJO

2.1 Sejarah PT. PLN (Persero)

Energi listrik mulai dikenal di negara Indonesia saat bangsa Belanda menjajah Indonesia. Bangsa Belanda terbiasa dalam menggunakan energi listrik untuk membantu kegiatan sehari-hari selama di Indonesia. Pembangkit listrik yang pertama kali dibangun terletak di daerah Gambir (Jakarta). Keberhasilan ini berlanjut dengan membangun pembangkit-pembangkit listrik di kota lain yang dikuasai oleh Belanda.

Setelah Bangsa Indonesia merdeka, pemakaian listrik mulai menyebar ke daerah-daerah perkotaan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Perkembangan listrik di Indonesia senantiasa mengalami perbaikan dan perluasan terutama dalam hal pendistribusian listrik pada pelanggan, begitu juga dengan peralatan pembangkit listrik untuk mendukung jaringan-jaringan transmisi.

Jenis golongan tarif listrik dibagi menjadi delapan, diantaranya:

1. Pelanggan tarif Rumah Tangga (R) adalah pelanggan perseorangan atau badan sosial yang tenaga listriknya digunakan untuk keperluan rumah tangga. Misalnya : rumah tempat tinggal, rumah kontrakan, rumah susun milik perorangan maupun perumnas, asrama keluarga pegawai perusahaan swasta, dan asrama mahasiswa.
2. Pelanggan yang termasuk dalam golongan tarif Sosial (S) adalah pelanggan badan sosial yang tenaga listriknya digunakan untuk kegiatan sosial. Misalnya : rumah sakit, panti sosial, panti rehabilitasi, tempat peribadatan, sekolah.
3. Pelanggan yang termasuk kedalam golongan tarif Bisnis (B) adalah Pelanggan yang sebagian atau seluruh tenaga listrik dari PT PLN (Persero) digunakan untuk salah satu atau beberapa kegiatan berbentuk : usaha jual beli barang atau jasa, perbankan, perdagangan ekspor/impor, CV, PT, Firma.

4. Pelanggan yang termasuk kedalam golongan tarif Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum (atau tarif publik) (P) adalah pelanggan yang tenaga listriknya digunakan untuk kegiatan dan kepentingan umum, kepentingan pemerintah, fasilitas kantor perwakilan negara asing.
5. Pelanggan yang dapat dikelompokkan dalam golongan tarif industri (I) adalah pelanggan yang tenaga listriknya digunakan untuk kegiatan industri.
6. Pelanggan yang dapat dikelompokkan dalam golongan tarif T (traksi) adalah perusahaan bergerak di bidang transportasi umum yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia.
7. Pelanggan yang dapat dikelompokkan dalam golongan tarif curah (C) adalah badan usaha Koperasi Unit Desa (KUD)
8. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Layanan Khusus pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR,TM,IT), diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif Sosial, Rumah Tangga, Bisnis, Industri, dan Pemerintah

Sebelum PT. PLN (Persero) menjadi seperti sekarang ini, pernah ada perusahaan-perusahaan listrik milik Belanda yang bersifat kedaerahan. Di bawah ini merupakan uraian-uraian secara kronologis dan kilas balik dasar hukum berdirinya PLN.

- **Periode Sebelum Tahun 1960**

Tahun 1940-an perusahaan listrik milik Belanda (swasta), antara lain *NV.ANIEM*, *NV.GEBEO*, dan *NV.OGEM*. Setelah Bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan, perusahaan listrik yang terpecah-pecah tersebut digabung menjadi satu perusahaan listrik Indonesia, yaitu “Jawatan Listrik dan Gas Republik Indonesia” berdasarkan ketetapan RI No. I/SD/ tahun 1945 tanggal 27 Oktober 1945 yang akhirnya pada tanggal 27 Oktober diperingati sebagai hari listrik nasional.

Bentukan ini tidak berlangsung lama karena setelah terjadi Konferensi Meja Bundar (KMB), keadaan perusahaan listrik di Indonesia kembali seperti tahun 1942, yaitu *NV.ANIEM*, *NV.GEBEO*, *NV.OGEM*. Adanya perjanjian Konferensi Meja Bundar memberikan perubahan-perubahan tentang PLN dan juga peralihan wewenang di dalam penguasaan listrik milik negara, yaitu :

1) Tahun 1957

Dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden RI No.163 tentang “Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa asing di Indonesia”. Ini menyebabkan pengambilalihan semua perusahaan listrik milik Belanda termasuk perusahaan listrik dan gas di seluruh wilayah RI.

2) Tahun 1958

Penguasaan perusahaan listrik dan gas diserahkan pengelolaannya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (Menteri PUT) dan untuk penyelenggaraannya dibentuk penguasaan perusahaan-perusahaan listrik dan gas (P3LG).

3) Tahun 1959

Tahun 1959 dibentuk Dewan Direktur PLN berdasarkan Keputusan Menteri PUT No. KPTS/1/4.14 tanggal 6 Juni 1959, sehingga P3LG yang telah dibentuk dibubarkan dengan Keputusan Menteri PUT No. KPTS/1/4.25 tanggal 16 Juni 1959, dan berdasarkan Keputusan Menteri PUT No. 1/1.10 tahun 1959. Susunan Pengurus Organisasi PLN pada masa ini sebagai berikut:

- a. Pemimpin : Dewan Direktur
- b. Bagian-bagiannya :
 - 1 Dinas Perencanaan Pembangunan
 - 2 Dinas Teknik
 - 3 Dinas Perniagaan
 - 4 Dinas Administrasi

- **Periode 1960 – 1970**

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 PP Tahun 1960 tentang “Perusahaan Negara”, maka mulai tanggal 1 Januari Tahun 1961 berdasarkan PP No. 67 Tahun 1961, Keputusan Menteri No. 18/1/20 tanggal 20 Mei Tahun 1961, didirikan “Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPUPLN)”.

BPUPLN adalah suatu perusahaan negara yang diserahi tugas untuk menguasai, mengurus perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang berbentuk badan hukum. Organisasi BPUPLN meliputi:

- a. Distribusi sebagai pimpinan BPUPLN
- b. PLN Pusat yang terdiri atas lima dinas.

- 1) Tahun 1965

Tahun 1965 berada di bawah naungan Departemen Kelistrikan. Pada saat itu juga diberlakukan PP No. 19 Tahun 1965 yang menetapkan bahwa:

- a. Membubarkan BPUPLN
- b. Mendirikan 2 Perusahaan, yaitu :
 1. PLN (Perusahaan Listrik Negara)
 2. PGN (Perusahaan Gas Negara)

- 2) Tahun 1966

PLN masuk Departemen Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga (DEPARDARIGA) di bawah naungan Dirjen Tenaga Listrik (Dirjen Gatrik). Untuk urusan tenaga dipisahkan dari PUT dan digabung dalam DEPARDARIGA berdasarkan Kepres No. 170 tahun 1966.

- 3) Tahun 1969

Tahun 1968 masuk kembali ke dalam Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (Dept. PTUL) di bawah Dirjen Gatrik, Departemen PTUL berdasarkan Peraturan Menteri PTUL No. 3/PRT/1968 tanggal 7 Juni 1968.

4) Tahun 1970

Berdasarkan Peraturan Menteri PTUL No. 5/PRT/1970, PLN ditempatkan langsung di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri atau Departemen PTUL.

- **Periode 1970 – Sekarang**

Status PLN mulai ditegaskan dalam PP No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara dinyatakan bahwa, “Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang didirikan dengan PP No. 19 tahun 1965 No. 11 tahun 1969 dan PP No. 33 tahun 1970 ditegaskan statusnya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 9 tahun 1969 dengan nama Perusahaan Listrik Negara disingkat PLN”.

Dengan terbentuknya kabinet pembangunan III pada tanggal 29 Mei 1980, PLN berada di bawah Departemen Pertambangan dan Energi. Tanggal 3 April 1978 tenaga listrik menjadi tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggung jawab Departemen Pertambangan dan Energi.

Perubahan Status Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Persero, berdasarkan PP No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994. Akte pendirian atau anggaran dasar PT. PLN (Persero), akte notaris oleh Sucipto, Sh di Jakarta No. 164 tanggal 30 Juli 1994.

2.2 Sejarah PT. PLN (Persero) Area Magelang

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV NIGN yang semula bergerak dibidang gas memperluas usahanya di bidang listrik untuk kemanfaatan umum. Pada tahun 1927 Pemerintah Belanda membentuk s' Lands Waterkracht Bedrijven (LB) yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dago, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea Lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta.

Selain itu di beberapa Kotapraja dibentuk perusahaan-perusahaan listrik Kotapraja.

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam perang Dunia II maka Indonesia dikuasai Jepang; oleh karena itu perusahaan listrik dan gas yang ada diambil alih oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil alih oleh orang-orang Jepang. Dengan jatuhnya Jepang ke tangan Sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda serta buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang.

Setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan kekuasaan Jepang, kemudian pada bulan September 1945, Delegasi dari Buruh / Pegawai Listrik dan Gas yang diketuai oleh Kobarsjih menghadap Pimpinan KNI Pusat yang waktu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka. Selanjutnya delegasi Kobarsjih bersama-sama dengan Pimpinan KNPI Pusat menghadap Presiden Soekarno, untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada Pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan Penetapan Pemerintah tahun 1945 No. 1 tertanggal 27 Oktober 1945 maka dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Dengan adanya Agesi Belanda I dan II sebagian besar perusahaan-perusahaan listrik dikuasai kembali oleh Pemerintah Belanda atau pemiliknya semula. Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerjasama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor-kantor Jawatan Listrik dan Gas di daerah-daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan. Para pemuda kemudian mengajukan mosi yang dikenal dengan Mosi Kobarsjih tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas Swasta kepada Pemerintah. Selanjutnya kristalisasi dari semangat dan jiwa mosi tersebut tertuang dalam Ketetapan Parleman RI No 163 tanggal 3 Oktober

1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa asing di Indonesia, jika waktu konsesinya habis.

Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajah Belanda maka dikeluarkan Undang Undang Nomor 86 tahun 1958 tertanggal 27 Desember 1958 tentang Nasionalisasi semua perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang nasionalisasi listrik dan gas milik Belanda. Dengan Undang-undang tersebut, maka seluruh perusahaan listrik Belanda berada ditangan bangsa Indonesia

2.3 Logo PT. PLN (Persero)

Bentuk, warna, dan makna lambang perusahaan resmi yang digunakan adalah sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No. 031/DIR/76 Tanggal : 1 Juni 1976, mengenai Pembakuan Lambang Perusahaan Listrik Negara.

Gambar 2.1

Logo PT. PLN (Persero)



Adapun masing – masing elemen pada lambang PLN memiliki makna sebagai berikut :

1. Bidang Persegi Panjang Vertikal



Menjadi bidang dasar bagi elemen – elemen lambang lainnya, selain itu juga melambangkan bahwa PT. PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala – nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

2. Petir atau Kilat



Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT. PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.

3. Tiga Gelombang



Memiliki arti gaya rambat listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu : pembangkitan, penyaluran, dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT. PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan untuk kehidupan manusia. Di

samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

2.4 Visi, Misi, Motto dan Nilai Perusahaan

PT. PLN (Persero) memiliki visi, misi, motto, dan nilai-nilai perusahaan, yaitu:

2.4.1 Visi Perusahaan

Setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki visi dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk PT PLN (Persero). Visi merupakan sebuah impian dan cita-cita yang akan dicapai di masa yang akan datang. Di bawah ini adalah visi dari PT PLN (Persero)

“Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani”.

Berikut ini adalah arti dari visi yang dimiliki PT PLN (Persero):

- a. Diakui

Mencerminkan cita-cita untuk meraih pengakuan dari pihak luar yang menunjukkan bahwa PLN pantas dipandang Perusahaan Kelas Dunia.
- b. Kelas Dunia

Menunjukkan kinerja yang melebihi ekspektasi pihak-pihak yang berkepentingan. Memberikan layanan yang mudah, terpadu, dan tuntas dalam berbagi masalah kelistrikan. Menjalin hubungan kemitraan yang akrab dan setara dengan pelanggan serta mitra usaha Nasional dan Internasional. Bekerja dengan pola pikir prima (*Mindset of Excellence*). Diakui oleh pelanggan dan mitra sebagai perusahaan yang mampu memenuhi standar mutakhir dan paling baik.
- c. Bertumbuh-kembang

Antisipatif terhadap perkembangan lingkungan usaha dan selalu siap menghadapi berbagai tantangan. Secara konsisten menunjukkan kinerja yang lebih baik.

d. Unggul

Menjadi yang terbaik dalam bisnis kelistrikan dan memenuhi tolak ukur mutakhir terbaik. Memposisikan diri sebagai perusahaan yang terkemuka dalam peraturan bisnis kelistrikan dunia. Mengelola usaha dengan mengedepankan pemberdayaan potensi insani secara maksimal. Meningkatkan kualitas proses, sistem, produk, dan pelayanan secara berkesinambungan.

e. Terpercaya

Memegang teguh etika bisnis yang tertinggi, menghasilkan kinerja terbaik secara konsisten, dan menjadi perusahaan pilihan.

f. Potensi Insani

Keberhasilan perusahaan lebih ditentukan oleh kesadaran anggota perusahaan untuk memunculkan seluruh potensi mereka dalam wujud wawasan aspiratif dan etikal, rasa kompeten, motivasi kerja, semangat belajar inovatif dan semangat bekerja sama. Potensi insani diperkaya dengan kompetensi yang terbentuk dari pengetahuan substansial, pengetahuan kontekstual, keterampilan, kemampuan, pengalaman, dan jenjang kerja sama.

2.4.2 Misi Perusahaan

Selain memiliki visi, PT PLN (Persero) juga memiliki misi. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Berikut ini adalah misi dari PT PLN (Persero) :

- a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

2.4.3 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan kode moral dan etika yang menjadi penentu apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan dan menunjang tercapainya visi perusahaan. Berikut ini adalah nilai-nilai dari PT PLN (Persero):

a. Saling Percaya (*Mutual Trust*)

Suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan dan integritas, itikad baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang bersih.

b. Integritas (*Integrity*)

Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan.

c. Peduli (*Care*)

Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama, dengan dijiwai kepekaan setiap permasalahan yang dihadapi perusahaan serta mencari solusi yang tepat.

d. Pembelajar (*Learner*)

Sikap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan kembali sistem dan praktik pembangunan, manajemen dan operasi, serta berusaha menguasai perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir demi pembaharuan perusahaan secara berkelanjutan.

2.5 Kegiatan Usaha Perusahaan

PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan sesuai dengan Undang-Undang No. 19/2000.

Kegiatan usaha perusahaan meliputi :

1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, penyaluran, distribusi tenaga listrik, perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik.
2. Menjalankan usaha penunjang dalam penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan konsultasi, pembangunan, pemasangan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan, Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
3. Menjalankan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan penyediaan tenaga listrik, Melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik, Menjalankan kegiatan perindustrian perangkat keras dan perangkat lunak bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain yang terkait dengan tenaga listrik, Melakukan kerja sama dengan badan lain atau pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan.

2.6 Struktur Organisasi Perusahaan

Salah satu sarana yang harus ada dalam lembaga atau perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu terdapat organisasi yang baik. Untuk itu, perlu adanya pembentukan struktur organisasi dengan tujuan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab tiap-tiap fungsi yang ada di dalamnya.

“Pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber

daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya.” (Handoko, 2008: 167).

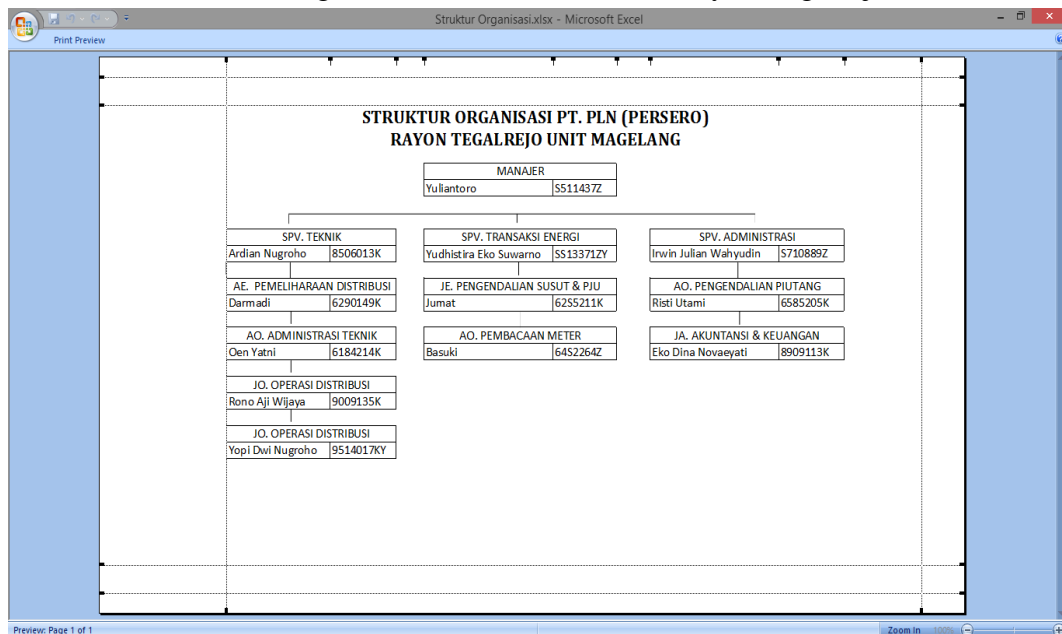
Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi dimana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan (Sule dan Saefullah, 2006: 152).

Pada PT. PLN (Persero) Rayon Tegalrejo menggunakan bentuk organisasi lini dan organisasi fungsional, dimana organisasi lini didalamnya terdapat garis wewenang yang berhubungan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan dan setiap kepala unit mempunyai tanggungjawab untuk melaporkan kepada kepala unit satu tingkat di atasnya. Sedangkan organisasi fungsional, dimana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian/fungsi khusus

Berikut adalah struktur organisasi PT. PLN (Persero) Rayon Tegalrejo, dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2

Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Rayon Tegalrejo



2.7 Tugas Pokok dalam Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Unit Distribusi dan Yogyakarta No. 176/GM DJTY/2008 Tanggal 24 Juli 2008, tugas pokok atau tanggung jawab utama jabatan PT. PLN (Persero) Rayon Tegalrejo adalah :

a. Manajer Area

Tugas pokok Manajer Area adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan usaha ketenagalistrikan secara efisien dan efektif yang meliputi : pemasaran dan niaga, perencanaan, pendistribusian energi listrik, keuangan, SDM & administrasi, membina hubungan kerja kemitraan dan komunikasi yang efektif guna menjaga citra perusahaan serta mewujudkan *Good Corporate Governance* serta melakukan pembinaan terhadap unit asuhannya. Tanggung Jawab Manajer Area adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja dan anggaran sebagai pedoman kerja.
2. Mengusulkan PRK (Program Rencana Kerja) Unit sebagai bahan penyusunan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan).
3. Membagi tugas bawahan & memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
4. Bertanggung jawab atas pengelolaan :
 - 1) Pelayanan Pelanggan.
 - 2) Pembacaan meter.
 - 3) Pencetakan rekening.
 - 4) Pembukuan Pelanggan.
 - 5) Penagihan.
 - 6) Pengawasan Kredit.
 - 7) Pendistribusian tenaga listrik.
 - 8) Operasi dan pemeliharaan tenaga listrik.
 - 9) Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)
 - 10) Aset perusahaan.
 - 11) Keuangan.
 - 12) Sumber Daya Manusia (SDM) dan Administrasi.

- 13) Mengoptimalkan dan memotivasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memenuhi target dan citra perusahaan.
- 14) Menerapkan peraturan untuk pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kewenangannya.
- 15) Bertanggung jawab atas sosialisasi dan pelaksanaan Pedoman Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan Keamanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- 16) Menyusun perkiraan kebutuhan energi listrik dan pendapatan penjualan tenaga listrik (*bottom-up load forecast*).
- 17) Menterjemahkan target kinerja perusahaan dari kantor induk disertai strategi pencapaiannya ke Unit asuhannya.
- 18) Mengendalikan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi.
- 19) Melakukan pembinaan dan mengevaluasi serta membuat peringkat atas pencapaian kinerja unit asuhannya secara berkala.
- 20) Bertanggung jawab atas rencana dan hasil pendapatan.
- 21) Bertanggung jawab atas permasalahan hukum di lingkungan kerja Area.
- 22) Bertanggung jawab atas *up dating* data pelanggan PDPJ (Penataan Data Pelanggan dan Jaringan).
- 23) Bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa.
- 24) Bertanggung jawab atas pengelolaan material PDP (*Plasma Display Panel*) dan material Pemeliharaan.
- 25) Bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran dana *imprest*.
- 26) Bertanggung jawab atas penerimaan dan pengiriman dana *receipt*.
- 27) Bertanggung jawab atas piutang lancar menjadi piutang ragu-ragu dan pengusulan penghapusannya ke Kantor Induk.
- 28) Bertanggung jawab atas penagihan kembali piutang ragu-ragu maupun piutang yang telah di hapuskan.
- 29) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga.

- 30) Berkoordinasi dengan Kantor Induk atas Penyelesaian klaim, tuntutan ganti rugi/santunan atas terjadinya kecelakaan ketenagalistrikan yang dialami masyarakat.
- 31) Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)
- 32) Bertanggung jawab atas pembuatan, pelaksanaan dan pemantauan *action plan* dalam rangka pencapaian target kinerja.
- 33) Bertanggung jawab atas penyusunan dan pencapaian tingkat mutu pelayanan.
- 34) Melaksanakan hubungan yang baik dengan Serikat Pekerja.
- 35) Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.
- 36) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain.

b. Manajer Rayon

Bertanggung jawab atas pengelolaan usaha ketenagalistrikan secara efisien dan efektif yang meliputi : pelayanan pelanggan, pengelolaan dan pengendalian rekening, pendistribusian energi listrik, keuangan dan administrasi. Manajer Rayon juga bertanggung jawab untuk membina hubungan kerja kemitraan dan komunikasi yang efektif guna menjaga citra perusahaan. Selain itu tanggungjawab utama manager rayon yaitu :

- a. Mengkoordinasikan tugas untuk mencapai target kinerja perusahaan.
- b. Mengkoordinasikan pengendalian operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi.
- c. Mengkoordinasikan penjualan tenaga listrik dan menjamin mutu keandalan
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk menekan *losses*.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan Keamanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyambungan baru, perubahan daya, administrasi pelanggan, pembacaan meter, proses rekening, pengelolaan piutang pelanggan.

- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kebijakan-kebijakan dan produk perusahaan, hak dan kewajiban pelanggan untuk peningkatan citra perusahaan.
- h. Mengkoordinasikan penerimaan dan pengeluaran dana *imprest* dan *receipt* untuk kelancaran operasional perusahaan.
- i. Mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dalam penetapan *cascading* KPI, penyusunan / pemantauan dan pembinaan SMUK, serta pembinaan kompetensi dan karir pegawai.
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan *stakeholder*, penandatanganan dan pertanggungjawaban aspek hukum sesuai dengan kewenangan di wilayah kerjanya.
- k. Mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan aset perusahaan di wilayah kerjanya.

c. Supervisor Teknik

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan, pengendalian operasi jaringan distribusi, perbaikan sarana penyediaan tenaga listrik yang terganggu dan membuat analisa dan evaluasi penyebab gangguan secara efektif dan efisien dalam rangka menjaga kontinuitas dan menjamin mutu keandalan penyaluran tenaga listrik. Selain itu tanggungjawab utama supervisor teknik yaitu :

- a. Melaksanakan pencapaian target kinerja fungsi teknik distribusi.
- b. Melaksanakan pengendalian konstruksi, operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk mempertahankan keandalan pasokan energi tenaga listrik.
- c. Menjaga aset dan pemutakhiran data perusahaan fungsi distribusi.
- d. Melaksanakan penyambungan dan pemutusan aliran tenaga listrik.
- e. Melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk menekan *losses*.
- f. Melaksanakan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2).

d. AE : Pemeliharaan Distribusi

- a. Menyusun perencanaan pemeliharaan jaringan distribusi.
- b. Menyiapkan jadwal pelaksanaan survei pemeliharaan jaringan distribusi.
- c. Menyiapkan rancangan teknis dan RAB pemeliharaan jaringan distribusi.
- d. Melaksanakan SOP dan kegiatan pemeliharaan jaringan distribusi.
- e. Menyiapkan SPK/kontrak dan pengawasan kegiatan pemeliharaan jaringan distribusi.
- f. Melaporkan *progress* kerja kegiatan pemeliharaan jaringan distribusi.

e. AO : Administrasi Teknik

- a. Melaksanakan pendataan dan membuat laporan pemutakhiran data asset jaringan distribusi.
- b. Melakukan survei perluasan jaringan sehubungan adanya permintaan PB / PD dan sambungan sementara.
- c. Melakukan survei pemeliharaan jaringan untuk peningkatan keandalan pasokan tenaga listrik
- d. Menyiapkan administrasi SPK pengembangan dan rehabilitasi jaringan distribusi.
- e. Melaksanakan dan atau mengawasi pekerjaan pembangunan jaringan distribusi termasuk pemasangan SLP dan SMP
- f. Memastikan Berita Acara (BA) hasil penyelesaian pekerjaan perluasan dan pemeliharaan jaringan distribusi
- g. Menyusun laporan rutin sesuai bidang tugasnya.

f. Junior Operator : Operasi Distribusi

- a. Menyiapkan data rencana operasi jaringan distribusi dalam keadaan normal atau gangguan untuk menjaga mutu dan keandalan tenaga listrik.

- b. Melaksanakan operasi jaringan dan proteksinya sesuai SOP untuk menjaga keandalan operasi dan keselamatan penyaluran tenaga listrik.
- c. Melaksanakan realisasi pencapaian tingkat mutu pelayanan, *saidi-saifi*, *losses* sesuai kinerja yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan pencatatan data *counter* PMT, LBS, *Recloser* dan *Sectionalizer*.
- e. Memelihara alat kerja operasi jaringan distribusi.
- f. Melaksanakan pengukuran tegangan jaringan distribusi (termasuk trafo) dan tegangan di titik pelayanan serta menyampaikan kepada fungsi terkait.
- g. Melaksanakan pemulihan gangguan jaringan distribusi.
- h. Menghitung dan membuat laporan SAIDI / SAIFI dan gangguan trafo.
- i. Melaksanakan inspeksi jaringan.

g. Supervisor Transaksi Energi

Bagian yang melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), baca meter dan juga pemeliharaan dan pengoperasian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) padapelanggan.

h. Junior Engineer : Pengendalian Susut dan PJU

- a. Menyiapkan data sasaran target operasi pada Pelanggan yang diduga melakukan pelanggaran.
- b. Menyiapkan perlengkapan administrasi, peralatan kerja dan sarana P2TL
- c. Melaksanakan P2TL sesuai Target Operasi (TO)
- d. Menghitung kerugian kWh akibat pelanggaran.
- e. Melaksanakan inventarisasi dan penertiban/pembongkaran PJU secara periodik.
- f. Menghitung dan membuat laporan susut distribusi.

g. Menyusun laporan rutin sesuai bidang tugasnya.

i. Junior Officer : Pembacaan Meter dan Pengendalian Piutang

- a. Memastikan pelaksanaan kualitas hasil Pembacaan Meter secara konvensional dan AMR.
- b. Melaksanakan pengolahan data (perhitungan) Tagihan listrik.
- c. Menyiapkan Tagihan Listrik (Pencetakan Rekening Listrik).
- d. Memastikan Tagihan Listrik & Tagihan Listrik Susulan.
- e. Memonitor Tagihan Listrik (Rekening).
- f. Melaksanakan pengawasan piutang.
- g. Menyiapkan Laporan Piutang Pelanggan (Lap. IV-04).
- h. Menyiapkan proses Usulan Penghapusan Piutang Pelanggan Raguragu.
- i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penagihan pelanggan tertentu, antara lain : TNI/ Polri & Instansi vertikal, dsb.

j. Supervisor Administrasi

Bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian kegiatan administrasi pelanggan serta evaluasi pelaksanaan administrasi pelanggan. Selain itu tanggung jawab utama supervisor administrasi yaitu :

- a. Melaksanakan pencapaian target kinerja fungsi administrasi.
- b. Memastikan pencapaian Tingkat Mutu Pelayanan.
- c. Melaksanakan penyambungan baru, perubahan daya, administrasi pelanggan, pembacaan meter, proses rekening, pengelolaan piutang pelanggan.
- d. Melaksanakan sosialisasi kebijakan-kebijakan dan produk perusahaan, hak dan kewajiban pelanggan untuk peningkatan citra perusahaan.
- e. Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran dana *imprest* dan *receipt* untuk kelancaran operasional perusahaan.

- f. Mengelola sumber daya manusia (SDM) dalam penetapan *cascading* KPI, penyusunan/pemantauan dan pembinaan SMUK, serta pembinaan kompetensi dan karier pegawai.
- g. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan mengelola asset perusahaan di wilayah kerjanya.
- h. Membuat konsep kerjasama dengan *stakeholder*.
- i. Mengelola Keamanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

k. Junior Analyst : Akuntansi dan Keuangan

- a. Menyiapkan permintaan Anggaran Tunai ke Kantor Area.
- b. Memastikan kelengkapan dan sahnya dokumen pembayaran.
- c. Melaksanakan verifikasi buku harian kas / bank *imprest output* SIMKEU.
- d. Memastikan kebenaran *soft copy* transaksi keuangan dari SIMKEU berikut lampirannya dan mengirim ke Kantor Area.
- e. Memastikan kebenaran dan validitas serta melakukan rekonsiliasi atas penerimaan dana *receipt* yaitu Sewa, Tagsus, BP, UJL, Biaya Administrasi
- f. Menyiapkan data pendukung RKAP.
- g. Memonitor penerimaan pendapatan.
- h. Melaporkan pajak ke Area secara periodik